

Tinjauan Teologis-Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kukuh Purwidhianto,^{1*} Alfred Ruben Gordon Ta'ek²

^{1,2}. Pasca Sarjana Magister Filsafat Keilahian, Universitas Kristen Duta Wacana

*Correspondence Author

Email: kukuhpurwidhianto87@gmail.com

Submitted: 03 Oktober 2022 Accepted: 28 Desember 2022 Published: 30 Desember 2022

Abstract

The discourse of extending the term of office of the president has become a classic phenomenon that keeps repeating itself. From the old order, the new order to the post-reform era, including during the current administration of President Joko Widodo. This paper describes the polemic of the discourse on extending the term of office of the president and discusses it with thoughts about politics, power, and democratic and theological-ethical government systems. This paper focuses on finding answers to the question, "How did the discourse on extending the presidency during the Joko Widodo administration finally fail in the middle of the road?" From a theological-ethical and political perspective, is it really only because of the better democratic system and the strength of civil society in Indonesia? Or is there another factor that will determine the success and failure of the discourse on extending the presidential term? Through this paper, the author argues that it is the ethical attitude of President Jokowi's leadership that will determine the end of the discourse.

Keywords: Length of service; President; Joko Widodo; Political; Indonesia, Ethical Theology

Abstrak

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi fenomena klasik yang terus-menerus berulang. Sejak masa orde lama, orde baru hingga pasca reformasi, termasuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Tulisan ini memaparkan polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan mempercakapkannya dengan pemikiran-pemikiran seputar politik, kekuasaan, sistem pemerintahan demokrasi dan teologis-etis. Tulisan ini berfokus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana wacana perpanjangan jabatan presiden di masa pemerintahan Joko Widodo akhirnya gagal di tengah jalan?" Dalam perspektif teologis-etis dan politik, benarkah ini hanya karena sistem demokrasi dan kekuatan *civil society* di Indonesia yang semakin baik? Ataukah, ada faktor lain yang paling menentukan gagal dan berhasilnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut? Melalui tulisan ini, penulis berargumen bahwa sikap etis kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang menjadi penentu berakhirnya wacana tersebut.

Kata-kata Kunci: Masa Jabatan; Presiden; Joko Widodo; Politik; Indonesia, Teologi Etis

PENDAHULUAN

“Sudah duduk lupa berdiri” merupakan *tag line* sebuah iklan mebel di era 80 an. Seseorang yang sudah duduk di sofa empuk betah berlama-lama dan cenderung tidak ingin berdiri kembali. Istilah populer di masa kini menyebutnya *pewe* (posisi *wuenak*). Dalam perkembangan zaman, ungkapan sudah duduk lupa berdiri lebih sering dimaknai secara filosofis peyoratif, semacam sindiran yang ditujukan kepada para pejabat publik yang masa jabatannya akan segera berakhir, namun terkesan ingin mempertahankan kursi kekuasaannya. Gelagat mencurigakan itu, bisa terbaca langsung dari sikap penguasa tersebut ataupun dari orang-orang terdekat di sekelilingnya. Bahkan bisa jadi sang penguasa sebenarnya ingin segera berdiri, namun para pelayan di sekitarnya yang justru tidak mau kehilangan nikmat kekuasaan. Berbagai cara dilakukan, mulai dari menggalang dukungan hingga mengubah pranata aturan demi mewujudkan keinginan.

Beberapa bulan yang lalu, jagad perpolitikan di tanah air sempat memanas, demonstrasi mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat tumpah ruah. Tidak hanya di Ibu kota tetapi menyebar di sudut-sudut kota di seluruh Indonesia. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi pemicu bangkitnya gejolak di masyarakat. Entah karena pengalaman traumatik di masa lalu, atau dipicu karena kualitas kesadaran politik yang semakin membaik. Yang jelas, untuk sementara waktu wacana perpanjangan masa jabatan presiden terlihat meredup. Namun pertanyaannya, benarkah keinginan-keinginan untuk melanggengkan kekuasaan sirna begitu saja? Ataukah, masih tertanam kuat di pikiran dan perasaan para politisi istana, yang dapat meletup sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Melalui tulisan ini penulis hendak menelisik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bagaimana awal mula tercetusnya ide perpanjangan masa jabatan presiden? Apa pertimbangan dan tujuan di balik wacana tersebut? Bagaimana publik memberi respon? Bagaimana sikap Presiden Joko Widodo? Bagaimana akhirnya, wacana tersebut seakan meredup dan tidak mampu terwujud? Dalam perspektif teologis-etis dan politik, benarkah ini hanya karena sistem demokrasi dan kekuatan *civil society* di Indonesia yang semakin baik? Ataukah, ada faktor lain yang paling menentukan gagal dan berhasilnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut? Melalui tulisan ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa faktor penentu itu adalah berasal dari sikap Presiden Joko Widodo.

Tulisan ini merupakan sebuah analisis deskriptif terhadap fenomena sosial politis perpanjangan masa kepemimpinan presiden, yang sedang gamang menjadi wacana publik Indonesia. Tampaknya belum banyak diskursus teologis mengenai fenomena ini. Namun, banyak kajian teologis yang telah dilakukan mengenai isu teologi dan politik. Emanuel G. Singgih menulis mengenai *iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. Di sini Singgih membawa keluar teologi dari kerangkeng doktrin di dalam gereja kepada pergumulan sosial, ekonomis, dan politik masyarakat Indonesia, agar iman Kristen menjadi relevan dan fungsional.¹ Di masa reformasi, diskursus teologis juga telah membahas berbagai isu politik di dalam praktik otonomisasi daerah.² Frans Magnis Suseno, seorang teolog, mengulas secara kritis realitas politik identitas yang gandrung terjadi dalam demokrasi Indonesia.³ Kajian biblis mengenai dinamika relasi kekuasaan dari teks yang relevan dengan pergumulan Indonesia,⁴ dan pergumulan umat di tengah krisis ekonomi, politik kebangsaan dari Umat Israel dan masyarakat Indonesia,⁵ juga telah dilakukan.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, kajian ini bertujuan untuk membangun diskursus teologis etis dan politis terhadap keributan wacana perpanjangan kepemimpinan presiden dalam era demokrasi Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pada bagian pembahasan, penulis memulai memperlihatkan wacana perpanjangan jabatan presiden sebagai fenomena klasik yang terus berulang dari masa ke masa. Bagian berikutnya tentang polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, baik dari pihak yang mendukung maupun menentang dan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo memandang persoalan tersebut. Selanjutnya, penulis mempercakapkan konteks permasalahan dengan pemikiran-pemikiran mengenai politik, demokrasi, kekuasaan dan teologis-etis. Pada bagian akhir, penulis menenun

¹ Emanuel G Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

² Arthur Arintonang, "Tanggapan Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37429/arumbae.v2i2.439>.

³ Franz Magnis-suseno, "POLITIK IDENTITAS? Renungan Tentang Makna Kebangsaan," *MAARIF Journal* 13, no. 2 (2018): 7–13.

⁴ Juliana A Tuasela, "The Dynamic of Power Relationship in Judges 16:1- 22 and Its Relevance in the Indonesian Context," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* Vol 4, no. 1 (2022): 81–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.797>.

⁵ Elifas Tomix Maspaitella, "Ratapan Umat Di Tengah Krisis Ekonomi Dan Politik: Tafsir Mazmur 80," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 98–116 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.810>.

relevansi teologis sebagai masukan bagi umat Kristen (gereja-gereja) di Indonesia dalam membangun tanggapan dan sikap politiknya di era demokrasi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Klasik Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

“Kekuasaan memang menggiurkan, sayang bila tidak dipertahankan,” merupakan sepenggal kalimat yang dijadikan judul artikel salah satu koran nasional. Motivasi inilah yang nampaknya membangkitkan gairah para politisi istana untuk menggaungkan ide (wacana) perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, setiap kali tiba di ujung akhir masa jabatan. Sejarah mencatat, keinginan untuk melanggengkan kekuasaan menjadi fenomena klasik yang terus berulang.

Di masa Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pernah melantik Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup. Keputusan tersebut tertuang dalam ketetapan MPRS nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup. Sampai akhirnya, Soekarno berkuasa selama 22 tahun (18 Agustus 1945-1967). Di masa Orde Baru, masa jabatan presiden kembali pada amanat UUD 1945 pasal 7 (sebelum diamandemen), “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menjabat lebih dari 31 tahun (1967-1998).⁶ Di paruh kedua masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana perpanjangan masa jabatan kembali mencuat. Meski pada akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sikap menolak, “Saya sangat aktif mendorong, untuk betul-betul jabatan presiden dibatasi. Dan itu paling jauh dua kali. Kalau ada pikiran dari siapapun untuk mengubah dan tak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY dan semua sepakat menolak pemikiran seperti itu”.⁷

⁶ Pin Pin dll., “Presiden Indonesia Tiga Periode,” *Jurnal Darma Agung* 29, no. 2 (Agustus 2021): 269–70.

⁷ Jaisy Rahman Tohir, “Dukung Jokowi Tiga Periode, PSI Seret SBY Hingga JK Serukan Amandemen UUD 1945,” *TribunJakarta.Com*, Maret 4, 2022, <https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/04/dukung-jokowi-3-periode-psi-seret-sby-hingga-jk-serukan-amandemen-uud-1945?page=all>.

Para Pendukung Wacana Tiga Periode

Kini, di dua tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir. Dicetuskan pertama kali oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Ia beralasan, Jokowi harus maju kembali agar bisa berpasangan dengan Prabowo. Strategi ini dipandang relevan untuk menghindari terjadinya polarisasi politik seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.⁸ Ide yang dicetuskan M. Qodari bagaikan bola liar yang memantul dan mengenai banyak orang. Ada yang dengan tegas menolak, ada yang ragu-ragu, namun ada pula yang mendukung. Tiga Ketua Umum partai politik, Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartanto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN) menyatakan menerima dan menampung banyak aspirasi dari konstituen yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden. Meski demikian, Cak Imin lebih setuju pada ide penundaan pemilu selama 1-3 tahun ke depan, dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.⁹ Sikap tidak jauh beda disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dea Tunggaesti. Sebagai bentuk cinta dan kekaguman kepada Presiden Joko Widodo, usulan perpanjangan masa jabatan tiga periode harus didukung. Menurutnya, perubahan amandemen konstitusi menjadi satu-satunya jalan yang wajib ditempuh.¹⁰

Bola liar terus memantul kesana kemari, tiga menteri di kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartanto, Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan terkesan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Nama yang terakhir mendapat sorotan paling tajam, karena pernyataannya soal *big data* yang diklaim dapat menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi dari masyarakat atas ide perpanjangan jabatan presiden.¹¹ Upaya untuk menampilkan persetujuan dari masyarakat bawah semakin nampak melalui acara

⁸ Egi Adyatama and Eko Ari Wibowo, "Pengamat Politik Qodari Jelaskan Alasan Mendukung Wacana Jokowi 3 Periode," *Tempo.Co*, March 16, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1442789/pengamat-politik-qodari-jelaskan-alasan-mendukung-wacana-jokowi-3-periode>.

⁹ Haryanti Puspa Sari, "3 Ketum Partai Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pusako: Terlalu Nyaman Di Lingkaran Kekuasaan," *Kompas.Com*, February 26, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/16235141/3-ketum-partai-bicara-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-pusako-terlalu?page=all>.

¹⁰ Teguh Firmansah, "PSI Tolak Tunda Pemilu, Tapi Siap Dukung Jokowi Jika UUD 1945 Diamendemen," *Republika.Id*, Maret 2, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r84562377/psi-tolak-tunda-pemilu-tapi-siap-dukung-jokowi-jika-uud-1945-diamendemen>.

¹¹ Andri Saubani, "Ini Daftar Menteri Yang Pernah Bicara Penundaan Pemilu," *Republika.Id*, April 6, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r9x6ih409/ini-daftar-menteri-yang- pernah-bicara-penundaan-pemilu>.

bertajuk Silaturahmi Nasional Desa. Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ini serentak menyatakan dukungannya atas ide perpanjangan jabatan presiden. Alasannya, sejak Presiden Joko Widodo menjabat ada banyak kemudahan-kemudahan yang dirasakan masyarakat bawah, terutama para petani dan nelayan. Saat Surta Wijaya, Ketua APDESI berpidato, ia bahkan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa. Menjadi persoalan, belakangan baru diketahui, APDESI yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).¹²

Para Penentang Wacana Tiga Periode

Di kubu seberang, aroma busuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan pertama kali oleh pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Ia menyebut akan ada skenario mengubah UUD 1945, dengan cara meminta diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR untuk memperbaiki 1-2 pasal. Ujungnya, ada tawaran pasal baru yang memberikan hak kepada presiden bisa dipilih tiga kali. Amien Rais menentang keras upaya-upaya semacam ini, dan bila benar terjadi berarti demokrasi di Indonesia sudah mati.¹³

Suara-suara penolakan makin bising dan terdengar dimana-mana. Berbagai alasan mendasar menjadi penting untuk didengarkan. Ahli hukum tata negara sekaligus Ketua Partai Bulan Bintang, Yuzril Ihza Mahendra berpendapat, kecil kemungkinan Jokowi bisa tiga periode. Alasannya, amandemen pertama UUD 1945 telah mengubah pasal 7, dimana presiden dan wakil presiden hanya menjabat maksimum dua kali periode jabatan, yakni 10 tahun. Konvensi ketatanegaraan bisa dilakukan, namun di zaman sekarang akan sulit menciptakan konvensi semacam itu.¹⁴ Pakar hukum tata negara lainnya, Bivintri Susanti menyatakan setidaknya ada tiga bahaya perubahan masa jabatan tiga periode. Pertama, berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyitir pernyataan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Lord Acton (1834-1902) "*power tends to*

¹² Dian Erika Nugraheny, "APDESI Bakal Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Setelah Lebaran," *Kompas.Com*, Maret 29, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/16521321/apdesi-bakal-deklarasi-dukung-jokowi-3-periode-setelah-lebaran?page=all>.

¹³ Ardhito Ramadhan, "Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode," *Kompas.Com*, Maret 15, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all>.

¹⁴ Tim Detik.Com, "Yusril Nilai Kecil Kemungkinan Presiden Bisa 3 Periode, Ini Analisisnya," *DetikNews*, Maret 15, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5494005/yusril-nilai-kecil-kemungkinan-presiden-bisa-3-periode-ini-analisisnya>.

corrupt, absolute power corrupts absolutely". Kedua, tidak ada regenerasi kepemimpinan. Padahal menurutnya, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang potensial di Indonesia. Ketiga, terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik.¹⁵ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan kejelasan sikap menolak. Menurutya, adanya konstitusi memang dipakai untuk membatasi masa jabatan, baik lingkup maupun waktunya. Meski demikian, Mahfud merasa tidak memiliki wewenang dan menyerahkannya kepada anggota partai politik dan MPR.¹⁶ Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyitir ucapan ayahnya, SBY bahwa perpanjangan jabatan presiden menabrak konstitusi. AHY menyebut para pengusung wacana penundaan pemilu sebagai pengkhianat reformasi.¹⁷

Tidak hanya di kalangan para politisi, suara penolakan tiga periode menggema kuat dalam ekspresi demonstrasi para mahasiswa dan berbagai komponen masyarakat. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tumpah ruah di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 11 April 2022. Mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan, mereka menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab.¹⁸

¹⁵ Budiarti Utami Putri and Eko Ari Wibowo, "Bivitri Susanti Sebut 3 Bahaya Masa Jabatan Presiden 3 Periode," *Tempo.Co*, Juni 21, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1474991/bivitri-susanti-sebut-3-bahaya-masa-jabatan-presiden-3-periode/full&view=ok>.

¹⁶ CNN Indonesia, "Mahfud MD Tak Setuju Usulan Presiden Tiga Periode," *CNN Indonesia*, Juni 21, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210621113402-32-657166/mahfud-md-tak-setuju-usulan-presiden-tiga-periode>.

¹⁷ CNN Indonesia, "AHY Anggap Pengusung Presiden 3 Periode Pengkhianat Reformasi," *CNN Indonesia*, April 17, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220417192013-32-785811/ahy-anggap-pengusung-presiden-3-periode-pengkhianat-reformasi>.

¹⁸ Dwi Arjianto, "Demo 11 April: BEM SI Tetap Tuntut Tolak Jokowi 3 Periode," *Tempo.Co*, April 11, 2022, https://nasional.tempo.co/read/1580903/demo-11-april-bem-si-tetap-tuntut-tolak-jokowi-3-periode?page_num=2.

Untuk mengetahui kepastian sikap masyarakat, lembaga-lembaga survei merilis hasil penelitian mengenai tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan masyarakat atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Seluruh lembaga survei memaparkan hasil serupa, apapun alasan dan pertimbangannya (pandemi Covid-19 belum berakhir, pemulihan ekonomi, keberlanjutan pembangunan Ibu kota negara), publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melakukan penelitian di tanggal 25 Februari- 1 Maret 2022 mencatat 70,7% publik menolak. Tidak jauh beda, Populi Center merilis angka 64,4% masyarakat menyatakan tidak setuju.¹⁹

Sikap Presiden Joko Widodo

Di awal-awal bergulirnya wacana tiga periode, sikap Presiden Joko Widodo dinilai sangat tegas. Ia menyatakan, mereka yang berwacana tiga periode ingin menampar, mencari muka dan ingin menjerumuskan. Jokowi berharap seluruh komponen negara berkonsentrasi saja terhadap tantangan eksternal.²⁰ Di pertengahan tahun 2021, Jokowi menegaskan kembali tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

Namun, seiring berjalannya waktu dan gaung wacana tiga periode semakin kencang, banyak yang berpendapat sikap Jokowi mulai melunak. Ia dinilai tidak tegas dan multitafsir. Dalam beberapa kesempatan ia menyatakan, di negara dengan sistem demokrasi, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik. Tidak ada yang melarang, bebas berpendapat. Namun, bila sudah pada pelaksanaan siapapun harus tunduk dan taat pada konstitusi. Sikap tidak tegas dan multitafsir ini dikhawatirkan mendorong elite partai politik mengamandemen UUD 1945.

Pada bulan Maret 2022, seiring dengan makin gencarnya penolakan terhadap wacana tiga periode, Jokowi kembali menyatakan akan selalu menegakkan konstitusi. Tidak lama berselang, tepatnya di bulan April, Jokowi menegor para pembantunya di kabinet Indonesia Maju, untuk tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Jokowi menegaskan tidak

¹⁹ Dewi Nurita and Febriyan, "Survei LSI: Masyarakat Tolak Semua Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi," *Tempo.Co*, March 3, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi>.

²⁰ Chandra Gian Asmara, "Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Ada Yang Ingin Cari Muka!," *Cnbc Indonesia*, Desember 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191202161521-4-119633/wacana-presiden-3-periode-jokowi-ada-yang-ingin-cari-muka>.

ingin mendengar ada yang menyuarakan wacana tiga periode dan penundaan pemilu.²¹ Selain dari Jokowi, belakangan ini publik dibuat kaget oleh pernyataan Gibran Rakabuming, putra Jokowi sekaligus Wali kota Solo. Menurutnya, sang ibunda, Iriana sudah mulai mencicil berkemas dari istana. Bahkan beberapa barang milik Jokowi sudah dikirim ke Solo menggunakan jasa kurir.²²

Pasca teguran Presiden Joko Widodo kepada para menteri, gaung wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode semakin melemah. Dosen Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad memandang teguran Jokowi sangat tepat di tengah situasi saat ini. Berisik dalam berdemokrasi memang wajar, namun ada persoalan-persoalan publik yang jauh lebih penting untuk dikerjakan. Menurutnya, Jokowi sadar penuh terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat, dan ia pun konsisten untuk taat kepada konstitusi.²³

Mengapa Gagal di Tengah Jalan?

Dalam artikel berjudul *Democracy*, J.W. de Gruchy menilai, saat ini demokrasi merupakan sistem politik pemerintahan yang terbaik di dunia. Walau demikian, demokrasi tetaplah sebuah sistem yang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai nilai-nilai hakikinya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.²⁴ Nilai-nilai hakiki yang dimaksud yaitu bahwa demokrasi menyiratkan suatu bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Karena itulah, demokrasi memerlukan supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif, kebebasan media dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan tidak hanya empat atau lima tahun sekali, tetapi turut mengawasi dalam setiap praktik dan

²¹ Fitria Chusna Farisa, "Jokowi Yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dan Presiden 3 Periode," *Kompas.Com*, April 7, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/05450001/jokowi-yang-akhirnya-larang-menteri-bicara-penundaan-pemilu-dan-presiden-3?page=all>.

²² Bayu Ardi Isnanto, "Jokowi-Iriana Kemasi Barang Dari Istana Ke Solo, Dikirim Pakai Kurir," *DetikNews*, Mei 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6081732/jokowi-iriana-kemasi-barang-dari-istana-ke-solo-dikirim-pakai-kurir>.

²³ Agung Nugroho, "Pengamat UGM: Tepat, Penghentian Polemik Presiden 3 Periode," *Universitas Gajah Mada* (blog), April 7, 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/22426-pengamat-ugm-tepat-upaya-penghentian-polemik-presiden-3-periode>.

²⁴ John W. de Gruchy, "Democracy," dalam *The Wiley Blackwell Companion to Political Theology* (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019), 473–75.

kebijakan pemerintah sehari-hari. Sebab demokrasi perwakilan selalu menghadapi bahaya terlepas dari konteks kebutuhan akar rumput. J.W de Gruchy menyadari, pengembangan etos dalam demokrasi bukan sebuah proses yang singkat sebab itulah membutuhkan penegasan terus-menerus. Demokrasi akan bekerja dengan baik bila ada komitmen dan partisipasi semua warga negara.

Dalam dialog dengan perspektif J.W de Gruchy, saya melihat bahwa gagalnya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo membuktikan kesadaran berdemokrasi di kalangan *civil society* semakin baik. Suara-suara penolakan dalam bentuk demonstrasi turun ke jalanan, maupun penolakan melalui berbagai tagar dan cuitan di media sosial, yang dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga berbagai elemen masyarakat menguatkan kesimpulan tersebut. Masyarakat tidak hanya memainkan perannya dalam partisipasi lima tahunan, sebaliknya setia mengawal dan mengawasi setiap praktik dan kebijakan pemerintah setiap saat. Wacana perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilu, nyatanya sangat melukai hati masyarakat yang telah siap menyambut pesta demokrasi (pemilu).

Selain itu, dahsyatnya gejolak yang ditimbulkan akibat wacana perpanjangan jabatan presiden tidak bisa dipisahkan dari peran media sosial. Soekarno di masa orde lama dan Soeharto di masa orde baru berhasil melanggengkan kekuasaannya, karena di masa itu kebebasan berpendapat dan berpolitik masih sangat dikekang. Apa yang terjadi di balik panggung perpolitikan tidak mudah diekspos oleh siapapun. Berbeda dengan masa kini, jangankan yang terjadi di belakang panggung, sesuatu yang belum terjadi sekalipun dapat diprediksi. Para politisi tidak bisa lagi menyembunyikan agenda-agenda terselubung, termasuk upaya untuk mengotak-atik pasal dan ayat di undang-undang. Tembok-tebok dan jendela tertutup mudah tertembus, secepat kilat diviralkan dan menyebar ke seluruh penjuru negeri.

Dalam buku *Bagaimana Demokrasi Mati*, S. Levitsky dan D. Ziblatt memaparkan contoh-contoh proses kematian demokrasi di beberapa negara. Menurutnya, pembunuh sistem demokrasi adalah para pemimpin negara. Pemimpin-pemimpin diktator yang disebut *demagog* seperti Fujimori, Chavez dan Erdogan menjadi penyebab kematian demokrasi. Mereka awalnya hanyalah pemimpin biasa yang dicintai rakyat, namun saat berkuasa mereka berbalik arah dan akhirnya merusak sistem demokrasi yang membatasi kekuasaan. Ada yang melakukannya terang-terangan, ada pula yang perlahan dan diam-diam, hingga

rakyat tidak menyadarinya. Semua seperti berjalan biasa, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.²⁵

Pertanyaannya, mungkinkah bisa terjadi ketika sistem konstitusi ditata dengan apik? Sangat mungkin. Konstitusi yang dirancang dengan sangat baik sekalipun kadang gagal. S. Lewitsky dan D. Ziblat mengambil contoh tumbangnya sistem demokrasi Jerman pasca Adolf Hitler berkuasa pada 1933. Kata dan kalimat di dalam seluruh sistem konstitusi selalu menghadirkan kesenjangan dan membuka ruang ambiguitas. Mengenang ungkapan Presiden Amerika Serikat Benjamin Harrison, “Tuhan tak pernah menganugerahi negarawan atau filsuf, atau siapa pun dengan cukup kebijaksanaan untuk merumuskan suatu sistem pemerintahan yang langsung dijalankan semua orang begitu saja”.²⁶ Penjaga demokrasi mudah dimanipulasi oleh para pemimpin yang anti-demokrasi. Sistem demokrasi yang apik kerap kali kalah dengan godaan kekayaan dan jabatan.

S. Lewitzky dan D. Ziblat menawarkan norma (aturan tak tertulis) sebagai penjaga demokrasi. Mereka menyebutnya sebagai *pagar lembut demokrasi*. Suatu kode etik bersama yang telah menjadi pengetahuan umum di suatu masyarakat, diterima, dihormati dan ditegakkan anggotanya. Mereka yang tidak menepati akan dicemooh dan dikucilkan terang-terangan. Dua norma yang dimaksud yaitu pertama *sikap toleransi*, merujuk ke gagasan bahwa selama pesaing-pesaing kita bermain sesuai aturan konstitusional, kita menerima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing berebut kekuasaan dan memerintah. Kita tidak memandang mereka sebagai ancaman apalagi memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Dengan kata lain, saling toleransi adalah kesediaan bersama para politikus untuk sepakat tak bersepakat. Bila norma saling toleransi lemah, demokrasi sukar dipelihara. Bila pesaing kita anggap sebagai ancaman, maka kita akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan mereka.²⁷

Kedua, *sikap menahan diri secara kelembagaan (institutional forbearance)*. Sikap menahan diri berarti pengendalian diri yang sabar; legawa dan toleran, atau tindakan tidak menggunakan suatu hak legal. Ketika norma menahan diri kuat, para politikus tidak menggunakan seluruh hak kelembagaan mereka, meskipun secara aturan sah-sah saja.

²⁵ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 55-59.

²⁶ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 81.

²⁷ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 83-86.

Mereka lebih mengutamakan menjaga sistem yang ada dari suatu ancaman. S. Lewitzky dan D. Ziblat mengangkat contoh persoalan masa jabatan presiden di Amerika Serikat. Sebelum amandemen ke-21 pada 1951, tidak ada pasal dalam konstitusi Amerika Serikat yang mewajibkan presiden berhenti menjabat sesudah dua masa jabatan. Goerge Washington merupakan presiden pertama yang memberi contoh tindakan menahan diri dari kelanggengan kekuasaan. Lawan sikap menahan diri adalah memanfaatkan hak istimewa kelembagaan tanpa batas. Ahli hukum Marks Tushnet menyebutnya *main kasar konstitusional*: suatu bentuk pertempuran kelembagaan yang bertujuan mengalahkan secara permanen pesaing tanpa peduli apakah permainan demokrasi berlanjut atau tidak.²⁸

Melalui pemikiran S. Lewitzky dan D. Ziblat, saya semakin diteguhkan untuk melihat bahwa berhentinya wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dikarenakan sikap tegas Presiden Joko Widodo. Berbekal koalisi besar partai politik pendukung pemerintah, Jokowi bisa saja melakukan lobi-lobi politik untuk mengubah pasal dan ayat di undang-undang. Apalagi ia telah memiliki modal dari tiga ketua partai politik besar (Golkar, PAN dan PKB) yang sejak awal mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Jokowi tidak tergoda untuk melakukannya, ia bukan demagog seperti pemimpin-pemimpin otoriter lainnya. Dua norma yang ditawarkan S. Lewitzky dan D. Ziblat rasanya dimiliki oleh Jokowi. Ia pemimpin yang memiliki toleransi tinggi terhadap lawan-lawan politiknya. Tidak hanya dibuktikan dengan jumlah koalisi pemerintah yang cenderung ‘gemuk’, lebih dari itu sejak awal Jokowi menunjukkan norma toleransi dengan merangkul pesaing politiknya saat pemilihan presiden. Prabowo Subianto direngkuh dan dijadikannya Menteri Pertahanan. Joko Widodo bukanlah pemimpin yang bermain kasar secara konstitusional, ia adalah sosok yang mampu menahan diri secara kelembagaan. Meski digoda dan dibujuk rayu oleh suara-suara untuk melanggengkan kekuasaan, dengan penuh kehati-hatian, mendengar berbagai masukan, akhirnya Joko Widodo membungkam para menteri yang selama ini sibuk membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Reinhold Niebuhr, seorang teolog yang dikenal dengan pandangan realisme Kristen, membangun teori di atas tiga proposisi Alkitab, yaitu: keberdosaan manusia (*sinfulness of man*), kebebasan manusia (*freedom of man*) dan keseriusan terhadap Perintah Agung (*Great*

²⁸ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 87-90.

Commandment).²⁹ Menurutnya, manusia selalu ditarik oleh dua kekuatan, pertama mengarahkan manusia keluar kepada kuasa Kristus penebus, kedua tarikan dosa yang mengarahkan manusia kepada diri sendiri. Manusia, masyarakat dan dunia perlu dilihat secara realistis, Allah memang menciptakan, menebus dan membaharui semua ciptaan, namun di sisi lain dunia ini dipenuhi dosa (*sinful world*). Reinhold Niebuhr berada di tengah-tengah sikap optimisme dan pesimisme terhadap manusia. Ia mengakui kekuatan spiritual kreatif manusia sebagai *imago dei*, namun sekaligus ia melihat dosa dan keterbatasan manusia. Sikap sombong dan egois manusia adalah tanda ia yang terbatas tetapi berpura-pura tidak terbatas. Kekacauan yang terjadi di dunia ini adalah bukti keberdosaan manusia. Manusia dalam kebebasannya memiliki daya merusak. Manusia memiliki kecenderungan naluriah “*will to live*” (kemauan untuk hidup) sekaligus “*will to power*” (kemauan untuk berkuasa). Walau demikian, sehebat apapun manusia, ia tidak pernah bisa menyamai Sang Pencipta.

Paulus S. Widjaja dalam artikel berjudul *Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus* juga mengangkat diskursus mengenai manusia yang selalu bersifat paradoksikal. Menurutnya, tidak ada yang salah di dalam keduanya. Manusia perlu menerima keduanya dengan syukur sebagai anugerah Allah, tanpa menafikkan satu di antaranya. Ada kepercayaan, optimisme, di satu pihak. Namun ia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pembenaran diri karena optimisme yang berlebihan.³⁰ Dalam konteks perpolitikan, para politikus kerap kali keblinger, terlalu optimis dalam memandang diri mereka sendiri, dan lupa bahwa betapapun mereka hebat, dipuja-puji dan dicintai rakyatnya, mereka tetap manusia yang terbatas. Paulus S. Widjaja mengutip kalimat Reinhold Niebuhr yang mengatakan:

Tragedi-tragedi dalam sejarah manusia, tidak disebabkan oleh para kriminal, yang secara tak disengaja disalibkan bersama Kristus; tetapi oleh orang-orang baik yang menyalibkan Dia, oleh para idealis yang tidak memahami campuran aneh dari minat pribadi dan ideal-ideal yang terkandung dalam semua motivasi manusia, oleh para pembaru yang gagal memahami perlunya pembaruan pribadi, oleh para imam yang tidak memahami bahwa “penghakiman dimulai dari dalam rumah Allah,” oleh para nabi yang tidak memahami dunia milik Tuhan dan berbicara “dari imajinasi hati

²⁹ Romeo Wibowo, “Manusia Menurut Reinhold Niebuhr” (Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), 2021), 8-9.

³⁰ Paulus Sugeng Widjaja, “Partisipasi Kristiani Dalam Politik Di Indonesia: Antara Mitos, Realita, Dan Politik Yesus,” *Gema Teologi* 38, no. 2 (2014): 132–33.

mereka sendiri,” oleh orang-orang bijak yang tidak memahami batas-batas dari hikmat mereka, dan oleh orang-orang benar yang tidak memahami bahwa “dalam pandangan Allah tidak ada manusia yang benar” (Niebuhr dalam Robertson [ed.], 1960: 332).³¹

Paulus S. Widjaja memberi peringatan keras agar manusia jangan terlalu optimis.³² Sebab, segala sesuatu yang berlebihan berujung pada ketidakbaikan. Bagaikan obat, menjadi baik dalam batas tertentu, sesuai resep dari dokter. Tetapi segera menjadi racun ketika dosisnya berlebihan. Betapapun hebatnya manusia tetap memiliki keterbatasan. Seorang pemimpin mesti menyadari sisi keterbatasannya, termasuk sadar diri kapan harus berhenti dan mengembalikan jabatannya. Sebab, kekuasaan selalu ada batasannya.

Ketegasan Presiden Joko Widodo menolak perpanjangan masa jabatan membuktikan dirinya bukan pemimpin yang mudah keblinger. Ia tahu ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Ia dicintai dan diidolakan oleh semua pihak, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Tangkapan kamera di jagad serba digital tidak bisa dibohongi. Setiap Jokowi mengadakan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, sambutan otentik dari masyarakat tersaji tanpa henti. Bukan drama atau telenovela. Suara riang anak-anak kecil memanggil nama, “Jokowi, Jokowi, Jokowi” menjadi bukti cinta dan kekaguman yang besar pada pemimpin negeri yang baik budi. Saya yakin, Jokowi sadar ia dicintai, tapi ia juga sadar jangan sampai lupa diri. Ia harus tetap legawa, segala sesuatu ada batasnya, termasuk jabatan dan kekuasaan. Estafet kepemimpinan tidak boleh berhenti, harus diteruskan. Dengan mengakhiri jabatan sesuai konstitusi, Jokowi justru menunjukkan cintanya yang besar untuk seluruh anak negeri.

Refleksi Teologis-Etis Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Pertama, ranah publik umumnya dipengaruhi tiga poros kekuasaan yaitu negara, pasar dan komunitas. Umat Kristen (gereja) berada di poros komunitas. Dalam menyikapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden, setepatnya gereja harus turut mengambil bagian, bersama-sama dengan komunitas-komunitas lainnya menyatakan penolakan dengan tegas. Gereja harus berani berbicara lantang, bukan karena menentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetapi justru karena mendukung dan mencintai sosok sang presiden. Suara lantang penolakan dari gereja justru menjadi cara umat Kristen

³¹ Paulus Sugeng Widjaja, 133.

³² Paulus Sugeng Widjaja.

menjaga kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap berjalan di *track* yang semestinya. Jangan sampai Presiden Joko Widodo justru jatuh dan terjerebab oleh godaan melanggengkan kekuasaan yang datang dari para politikus di sekitar.

Kedua, E.G Singgih dalam buku, *Iman dan Politik* menyatakan: “Pengandalan yang berlebih-lebihan pada negara dan pemerintah bisa menyebabkan pemahaman dan pembangunan teologi kontekstual yang mendukung *status quo*, dalam arti mendukung setiap kebijakan pemerintah dan negara.”³³ Peringatan E.G Singgih ini menjadi catatan penting bagi gereja-gereja agar tidak serta merta berada di pihak pendukung pemerintah. Gereja tidak boleh menjadi *buzzer* pemerintah yang hanya sibuk memberi dukungan membabi buta dan akhirnya kehilangan suara profetisnya. Gereja harus tetap jernih memandang setiap kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Menjadi gereja yang kritis-profetis adalah bertindak menggunakan nalar obyektif untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak jatuh ke dalam *abuse of power*. Sehebat apapun pemerintah di suatu rezim, tetaplah terdiri atas manusia-manusia yang memiliki sifat paradoks, kreatif dan transenden sekaligus berdosa dan terbatas. Gereja setepatnya harus terus membuka mata, telinga dan hati nurani dalam sebuah pertanyaan reflektif, apakah kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah benar-benar menyejahterakan semua orang? Eka Darmaputera mengingatkan umat Kristen (gereja) dengan sebuah prinsip: “*something which is good only for Christian is un-Christian*”. Yang Kristiani adalah kalau itu baik untuk semua orang.³⁴

Ketiga, tahun 2024 adalah tahun politik. Pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan wakil rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden akan kembali diselenggarakan. Suasana perpolitikan di tanah air sudah semakin menghangat. Umat Kristen harus berpartisipasi dalam peristiwa akbar ini. Berpartisipasilah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, kenali lebih dekat calon-calon wakil rakyat dan pemimpin negara, pelajarylh *track record* hingga akhirnya tepat dalam menetapkan pilihan. Pilihlah pemimpin yang tidak gampang keblinger, tau diri kapan saat mulai dan kapan harus berhenti. Pilihlah pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat dan peka terhadap suara hati nurani. Tidak hanya menjadi bagian dari pesta demokrasi, bersama dengan komunitas

³³ Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 15.

³⁴ Emanuel Gerrit Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 325.

lainnya umat Kristen (gereja) harus mengawal pesta demokrasi agar terselenggara dengan jujur, adil dan penuh kedamaian. Gereja (umat Kristen) harus berani dengan tegas menolak berbagai bentuk politik transaksional yang kerap kali memakai janji-janji manis fasilitas dan jabatan publik serta politik uang. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pesta demokrasi harus dijaga agar berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Gemerlap kekuasaan kerap kali membutakan mata, menulikan telinga, membohongi hati nurani. Para pemimpin adalah manusia biasa, di satu sisi mereka memang dianugerahi hikmat dan akal budi sebagai gambar Yang Ilahi, namun di sisi lain mereka ringkih dan rapuh, mudah jatuh pada dosa dan pelanggaran. Tata aturan dan hukum menjadi pengawal yang harus terus ditegakkan sekaligus dikembangkan agar mampu menjawab pergumulan dan tantangan zaman. Kecerdasan dan kekuatan *civil society* mesti terus ditingkatkan, dalam kebersamaan dan kesatuan bergandeng tangan menjaga sistem demokrasi tetap lestari. Walau demikian, ujung akhir tetap berada di tangan para pemimpin (penguasa) negara, merekalah yang menjadi penentu apakah akan menjadi demagog yang menghancurkan demokrasi atau sadar diri lalu turut menjaga demokrasi.

Dalam istilah Jawa ada ungkapan: “*Aja rumangsa bisa, ananging bisa rumangsa*” (Jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa). Seorang pemimpin harus tetap memiliki kerendahan hati di tengah segala apresiasi dan prestasi. Seorang pemimpin juga harus tahu diri, ada saatnya memulai, ada saatnya mengakhiri. Seperti pesan Kitab Pengkotbah, “Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya...” (Pengkotbah 3:1). Kalau memang sudah tiba di ujung akhir jabatan, maka akhirilah dengan legawa dan penuh kegembiraan. Kalau sudah saatnya berhenti maka berhentilah. Kalau sudah saatnya berdiri, maka berdirilah. Sudah duduk (jangan) lupa berdiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, Egi dan Eko Ari Wibowo. "Pengamat Politik Qodari Jelaskan Alasan Mendukung Wacana Jokowi 3 Periode." *Tempo.Co*. March 16, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1442789/pengamat-politik-qodari-jelaskan-alasan-mendukung-wacana-jokowi-3-periode>.
- Arjianto, Dwi. "Demo 11 April: BEM SI Tetap Tuntut Tolak Jokowi 3 Periode." *Tempo.Co*. April 11, 2022. https://nasional.tempo.co/read/1580903/demo-11-april-bem-si-tetap-tuntut-tolak-jokowi-3-periode?page_num=2.
- Aritonang, Arthur. "Tanggapan Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37429/arumbae.v2i2.439>.
- Asmara, Chandra Gian. "Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Ada Yang Ingin Cari Muka!" *Cnbc Indonesia*. Desember 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191202161521-4-119633/wacana-presiden-3-periode-jokowi-ada-yang-ingin-cari-muka>.
- CNN Indonesia. "AHY Anggap Pengusung Presiden 3 Periode Pengkhianat Reformasi." *CNN Indonesia*. April 17, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220417192013-32-785811/ahy-anggap-pengusung-presiden-3-periode-pengkhianat-reformasi>.
- . "Mahfud MD Tak Setuju Usulan Presiden Tiga Periode." *CNN Indonesia*. Juni 21, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210621113402-32-657166/mahfud-md-tak-setuju-usulan-presiden-tiga-periode>.
- de Gruchy, John W. "Democracy." Dalam *The Wiley Blackwell Companion to Political Theology*, 473–75. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019.
- Farisa, Fitria Chusna. "Jokowi Yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dan Presiden 3 Periode." *Kompas.Com*. April 7, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/05450001/jokowi-yang-akhirnya-larang-menteri-bicara-penundaan-pemilu-dan-presiden-3?page=all>.
- Firmansah, Teguh. "PSI Tolak Tunda Pemilu, Tapi Siap Dukung Jokowi Jika UUD 1945 Diamendemen." *Republika.Id*. Maret 2, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r84562377/psi-tolak-tunda-pemilu-tapi-siap-dukung-jokowi-jika-uud-1945-diamendemen>.
- Isnanto, Bayu Ardi. "Jokowi-Iriana Kemasi Barang Dari Istana Ke Solo, Dikirim Pakai Kurir." *DetikNews*. Mei 2022. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6081732/jokowi-iriana-kemasi-barang-dari-istana-ke-solo-dikirim-pakai-kurir>.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Magnis-suseno, Franz. "POLITIK IDENTITAS? Renungan Tentang Makna Kebangsaan." *MAARIF Journal* 13, no. 2 (2018): 7–13.
- Maspaitella, Elifas Tomix. "Ratapan Umat Di Tengah Krisis Ekonomi Dan Politik: Tafsir

- Mazmur 80.” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 98–116 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.810>.
- Nurita Dewi dan Febriyan. “Survei LSI: Masyarakat Tolak Semua Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi.” *Tempo.Co*. Maret 3, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi>.
- Nugraheny, Dian Erika. “APDESI Bakal Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Setelah Lebaran.” *Kompas.Com*. Maret 29, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/16521321/apdesi-bakal-deklarasi-dukung-jokowi-3-periode-setelah-lebaran?page=all>.
- Nugroho, Agung. “Pengamat UGM: Tepat, Penghentian Polemik Presiden 3 Periode.” *Universitas Gajah Mada* (blog), April 7, 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22426-pengamat-ugm-tepat-upaya-penghentian-polemik-presiden-3-periode>.
- Pin Pin, Jannus Timbo Halomoan Siahaan, Bertha Nellya, and Matius Bangun. “Presiden Indonesia Tiga Periode.” *Jurnal Darma Agung* 29, no. 2 (Agustus 2021): 269–70.
- Putri, Budiarti Utami dan Eko Ari Wibowo. “Bivitri Susanti Sebut 3 Bahaya Masa Jabatan Presiden 3 Periode.” *Tempo.Co*. Juni 21, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1474991/bivitri-susanti-sebut-3-bahaya-masa-jabatan-presiden-3-periode/full&view=ok>.
- Ramadhan, Ardhito. “Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode.” *Kompas.Com*. Maret 15, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all>.
- Sari, Haryanti Puspa. “3 Ketum Partai Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pusako: Terlalu Nyaman Di Lingkaran Kekuasaan.” *Kompas.Com*. Februari 26, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/16235141/3-ketum-partai-bicara-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-pusako-terlalu?page=all>.
- Saubani, Andri. “Ini Daftar Menteri Yang Pernah Bicara Penundaan Pemilu.” *Republika.Id*. April 6, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r9x6ih409/ini-daftar-menteri-yang-terlalu-bicara-penundaan-pemilu>.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- . *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Singgih, Emanuel G. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Tuasela, Juliana A. “The Dynamic of Power Relationship in Judges 16:1- 22 and Its Relevance in the Indonesian Context.” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* Vol 4, no. 1 (2022): 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.797>.
- Tim Detik.Com. “Yusril Nilai Kecil Kemungkinan Presiden Bisa 3 Periode, Ini Analisisnya.” *DetikNews*. Maret 15, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5494005/yusril-nilai-kecil-kemungkinan-presiden-bisa-3-periode-ini-analisisnya>.
- Tohir, Jaisy Rahman. “Dukung Jokowi Tiga Periode, PSI Seret SBY Hingga JK Serukan Amandemen UUD 1945.” *TribunJakarta.Com*. Maret 4, 2022.

<https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/04/dukung-jokowi-3-periode-psi-seret-sby-hingga-jk-serukan-amandemen-uud-1945?page=all>.

Wibowo, Romeo. "Manusia Menurut Reinhold Niebuhr." Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), 2021.

Widjaja, Paulus Sugeng. "Partisipasi Kristiani Dalam Politik Di Indonesia: Antara Mitos, Realita, Dan Politik Yesus." *Gema Teologi* 38, no. 2 (2014): 132–33.